ABSTRAK

Nurin Nabilah 2024, *Implementasi UU No.41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf di Pondok Pesantren Pamekasan.* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Moh. Afandi, S.H.I,M.H.I.

Kata Kunci: Implementasi, UU No.41 Tahun 2004, Wakaf, Pondok Pesantren

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian Pondok Pesantren Pamekasan telah melaksanakan harta Wakaf sesuai dengan ketentuan syari'ah, implementasi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 masih jauh dari optimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain adalah masalah administrasi yang belum tertata dengan baik, kurangnya pemahaman mengenai tata cara administrasi dan pelaporan, serta keterbatasan kapasitas pengelola wakaf dalam menerapkan prinsip tata kelola yang efektif. Selain itu, pengelola wakaf di Pondok Pesantren ini juga menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan dan pengembangan aset wakaf yang dimiliki.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta Wakaf di Pondok Pesantren Pamekasan masih belum maksimal, meskipun ada upaya untuk memenuhi persyaratan syari'ah. Kendala utama terletak pada kurangnya pemahaman mengenai pelaporan tugas wakaf dan rendahnya kapasitas pengelola dalam menerapkan sistem pengelolaan yang lebih profesional dan transparan. Masalah administrasi yang kurang terstruktur menjadi hambatan signifikan dalam mencapai tujuan pengelolaan wakaf yang optimal.

Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 kepada pengelola Pondok Pesantren, serta memperkuat sistem administrasi dan pelaporan pengelolaan wakaf. Dengan demikian, pengelolaan wakaf dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar untuk kemaslahatan umat, khususnya bagi santri dan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren.